

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Perusahaan (*Good Governance*) merupakan isu yang sedang gencar-gencarnya untuk dikampanyekan. Karena di dalamnya mengandung unsur: yang pertama, keterbukaan sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa *stakeholders* memiliki keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap institusi pemerintah dan terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi pemerintah tersebut. Iklim keterbukaan yang diciptakan melalui proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak *stakeholders* dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif. Kedua, integritas mencakup dua hal pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik. Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisatoris pada institusi publik kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka. Secara umum, ketiga prinsip *good governance* tersebut di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam ketiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut.

Dalam rangka melakukan upaya konkrit mewujudkan *good governance*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas diharapkan mampu mengubah kondisi pemerintahan yang masih kurang dalam memberikan pelayanan publik dan pemerintahan

yang korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Karena Akuntabilitas dapat menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Hal tersebut akan mampu membangun kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah.

Sejak bergulirnya era reformasi atau orde baru, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No 9 Tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaannya, beberapa peraturan pemerintah sudah pula dikeluarkan. Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan era desentralisasi fiskal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Penerimaan dari Lain-lain pendapatan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah memerlukan suatu sistem pengendalian intern yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi efektifitas sistem pengendalian intern.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK dilakukan dalam rangka

menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan ini berupa laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini.

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 mengungkapkan 4 opini Tidak Wajar (1%), 31 opini Tidak Memberikan Pendapat (5%), 194 opini Wajar Dengan Pengecualian (36%) dan 313 opini Wajar Tanpa Pengecualian (58%). (Sumber: LHP BPK Tahun 2016 Semester II).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP yang digunakan saat ini adalah kas to akrual. Standar ini dijadikan pedoman oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tentunya SAP ini juga berimbas pada kinerja pemerintah daerah yang harus meningkat juga. Karena kinerja pemerintah yang baik tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purbasari dan Bawono (2017) tentang desentralisasi fiskal, sistem pengendalian intern, dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menghilangkan variabel desentralisasi fiskal dan menjadikan kinerja pemerintah menjadi variabel *intervening*.

Berdasarkan beberapa paparan dan penjelasan di atas, maka penulis memilih judul “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se - Jawa Periode 2015)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel *intervening*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan.
2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel *intervening*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak, diantara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, khususnya bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern, akuntabilitas laporan keuangan, dan kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai akuntabilitas laporan keuangan suatu pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uaian tentang teori-teori secara ringkas menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti, kerangka teori dan penelitian sebelumnya.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uaian tentang penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu subyek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uaian tentang hasil analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk obyek peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya.